

## STRATEGI PEMERATAAN EKONOMI RAKYAT YANG BERKEADILAN

Ketut Rendi Astuti<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Denpasar

Email: [1astuti.rendi@gmail.com](mailto:1astuti.rendi@gmail.com)

**Abstract :** *In order to accelerate equity economic and equitable hence the government should build infrastructure in all line. So that to make good and service distribution line become easy and cheaper, so that small public can enjoy technology advance. The government effort to overcome economic gap by release economic policy which equitable and focus on three things as follows: 1) by giving road access, 2) opportunity freely, 3) improvement on human resource capacity. Small enterprise should be empowered and each regency should there is an entrepreneur who has equitable commitment, so that growth which equitable become guidelines to empowering of public so that don't occur economic gap.*

**Keywords:** *equalization strategy, popular economic justice.*

### PENDAHULUAN

Untuk mencapai ekonomi yang merata dan berkeadilan di Indonesia masih jauh panggang dari api, namun langkah pemerintah menuju kesana paling tidak untuk mempercepat pemerataan perekonomian ditandai dengan pembangunan infrastruktur jalan, laut, dan pelabuhan udara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) banyak digelontorkan untuk membangun infrastruktur di daerah bahkan termasuk daerah yang terpencil di Papua. Untuk mempercepat ekonomi yang merata dan berkeadilan pemerintah sudah seharusnya membangun infrastruktur disegala lini seperti jalan tol, kereta cepat hingga jalur laut yang cepat dan murah. Ketika itulah membuat jalur distribusi barang dan jasa menjadi mudah dan murah, rakyat kecilpun menikmati kemajuan teknologi tersebut.

Jika pemerintah ingin segera maju dalam infrastruktur harus berani mencetak insinyur dan politeknik sipil yg banyak dan berkualitas. Kedua buatlah listrik itu murah dan harga semen terjangkau. dengan demikian geliat perekonomian kian maju, sebab dengan listrik mahal Usaha Kecil Menengah (UKM) pun akan jalan ditempat. Langkah pemerintah mengatasi ketimpangan ekonomi dengan meluncurkan

kebijakan ekonomi yang berkeadilan yang fokus pada tiga hal yaitu 1) pemberian akses jalan, 2) perluasan kesempatan, 3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam hal pemberian kesempatan pemerintah melakukan pengenaan pajak yang berkeadilan. Diantaranya meningkatkan nilai transaksi pajak properti dari pengumpul tanah, sehingga mendekati wajar dari harga properti.

Program *Tax amnesty* belum pro rakyat melainkan masih lebih mementingkan pihak-pihak tertentu khususnya kalangan pengusaha. *Tax amnesty* yang diprogramkan pemerintah memang efektif untuk melakukan hal itu, namun hasilnya belum maksimal. Karena ternyata justru masih banyak berbagai sektor usaha didalam negeri yang dimiliki pihak luar (asing). Hal ini tentu membuka celah kebocoran, karena terjadi *capital flight* (pelarian data ke luar negeri) yang cukup besar. Menurut Abdul Halim, (2004) yang dimaksud efektivitas adalah ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Jika saja berbagai sektor usaha didalam negeri ini bisa didanai dan dikuasai anak negeri sendiri tentu dana yang berhasil dihimpun cukup besar dan bisa dimanfaatkan maksimal untuk membiayai berbagai pembangunan. Dengan begitu pemerintah

tidak perlu terlalu sibuk lagi mengundang investor asing untuk berbondong-bondong menanamkan modalnya didalam negeri. Apakah artinya jika para investor itu besar-besaran menanamkan modalnya di dalam negeri untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dan dibawa lagi keluar negeri. Bukankah ini sama halnya dengan penjajahan baru dalam bentuk ekonomi.

Seharusnya semua komponen bangsa menyadari akan hal itu bahwa kita tidak mau lagi dijajah termasuk dalam bentuk penjajahan ekonomi. semangat persatuan dan kesatuan yang digelorakan seharusnya mampu dikemas dan diarahkan kesitu. Mari gunakan semangat persatuan dalam perbedaan untuk kemajuan bangsa agar Indonesia kembali berjaya di era persaingan bebas dunia. Etos kerja merupakan lokomotif kemajuan bangsa yang mesti dibiasakan, dibudayakan, diasah dan dioptimalkan. Jika etos kerja kita tinggi tentu saja akan dapat mengangkat kualitas dan martabat bangsa. Karena itu etos kerja merupakan keharusan bagi semua, jika benar-benar ingin menjadi bangsa yang besar, etos kerja akan menggerakkan aktivitas, kreativitas dan produktivitas kerja. Kesempatan lebih besar juga diberikan kepada pemilik usaha mikro kecil dan menengah.

Dengan cara ini diharapkan akan terjadi kenaikan kelas bagi pengusaha mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar. Munculnya rencana dari pemerintah pusat untuk membatasi pembangunan toko modern diwilayah pemukiman sangat tepat untuk memecahkan persoalan yang ada. Pembatasan *minimarket* (*convenience store*) untuk mendorong kebijakan pemerintah merupakan upaya melindungi pasar tradisional yang makin terjepit dengan keberadaan jaringan *minimarket*. Pemerintah bertujuan membatasi kepemilikan satu korporasi atau investor dalam sebuah jaringan *minimarket*.

Pemerintah saat ini sedang merumuskan peraturan yang akan memberikan peluang bagi pasar tradisional agar tumbuh dan lebih

berkembang. Pedagang tradisional juga akan diberikan akses besar dengan cara: 1) melarang pembangunan pasar modern di zona pasar tradisional dan 2) kewajiban penyerapan produk lokal setempat dan perkembangan rantai nilai 3) basis kebijakan ketiga adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mengurangi pengangguran.

Guna mewujudkan pemerataan ekonomi pemerintah membuat program ekonomi yang berkeadilan melalui tiga pilar utama yang disebut tiga pilar kebijakan untuk pemerataan ekonomi yaitu: 1) lahan, 2) kesempatan, dan 3) pelatihan serta pendidikan vokasional yang nantinya akan dikembangkan menjadi banyak. UKM harus diberdayakan dan di setiap kabupaten dan kota harus ada pengusaha yang punya komitmen kerakyatan, sehingga pertumbuhan yang berkeadilan itu menjadi pedoman kita semua. Untuk memberdayakan masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan ekonomi.

## KAJIAN LITERATUR

### Resistensi Ekonomi Rakyat Dalam Krisis Moneter

Frans Seda (2002) menyatakan bahwa resistensi kreativitas ekonomi rakyat, produktivitas sektor tradisional dan berfungsinya asas kekeluargaan merupakan kekuatan ekonomi kecil yang telah mampu menahan kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh krisis. Bayu Krisnamurthi (2002) menyatakan bahwa ekonomi rakyat merupakan korban dari krisis moneter yang terjadi belum lama ini terutama akibat timbulnya berbagai masalah setelah krisis terjadi. Disamping akibat pilihan kebijakan yang diterapkan sebagai usaha mengatasi krisis. Krisis ekonomi di tahun 1998 menyebabkan melonjaknya angka kemiskinan di Indonesia. Kenaikan inflasi pada tahun 1998 disebabkan oleh krisis rupiah yang membuat hampir semua barang-barang kebutuhan pokok naik drastis. Akibat dampak krisis ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, Tambunan, (2001). Resistensi ekonomi rakyat disebabkan oleh

asas kekeluargaan yang betul-betul hidup dimasyarakat dan merupakan asas solidaritas dalam kehidupan ekonomi rakyat terutama dalam krisis ekonomi Indonesia.

Sehubungan dengan itu yang harus dilakukan adalah hendaknya para pakar/pengamat yang selama ini meragukan berfungsinya asas kekeluargaan seperti tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 berpikir ulang untuk memahami dan mengkaji asas kekeluargaan untuk diterapkan menjadi suatu kebijakan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi (Frans Seda, 2002). Ekonomi rakyat menjadi pendukung utama perekonomian nasional, meskipun kebijakan pemerintah hampir tidak pernah berpihak kepada ekonomi rakyat. Pemulihan ekonomi nasional dari krisis yang berkepanjangan justru terletak pada ekonomi rakyat (Mubyarto, 2002).

Bukti kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada ekonomi rakyat adalah swastanisasi/privatisasi dari pelaku utama pembangunan melalui proses liberalisasi dengan mekanisme deregulasi berbasis visi dan semangat liberal. Swastanisasi ini berlangsung tanpa kendali sebagai akibatnya runtuhlah ekonomi modern dalam tubuh ekonomi bangsa yang kondisinya berbeda dengan eksistensi ekonomi rakyat yang memiliki resistensi tinggi dalam krisis multidimensional.

Ekonomi rakyat bukanlah ekonomi tersembunyi (*hidden economy*) melainkan ekonomi *wong cilik* yang dapat dengan mudah dilihat dan ditemukan dimana-mana disekitar kita, baik didesa maupun dikota-kota. Menjamurnya pedagang kaki lima dikota-kota besar dan kecil merupakan indikator penemuan ekonomi rakyat pada habitatnya yang benar ketika ekonomi sektor industri modern makin tertutup dan bermasalah. Jika pemerintah menganggap menjamurnya pedagang kaki lima sebagai masalah yang memusingkan, ditinjau dari para pelaku ekonomi rakyat ia merupakan pemecahan masalah (*solution*). Pemecahan masalah ini sama sekali tidak memproleh

bantuan modal dari pemerintah atau bank-bank pemerintah, tetapi semuanya dengan modal mereka sendiri.

## PEMBAHASAN

### Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Dalam pemberdayaan ekonomi rakyat diperlukan strategi yang dibangun dari komitmen bersama dari seluruh komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Komponen-komponen bangsa tersebut adalah pemerintah dan parlemen yang berperan penting dalam merumuskan kebijakan dan regulasi ekonomi, akademisi sebagai perumus konsep dan teori ekonomi nasional, pengusaha besar atau kecil atau usaha kecil dan menengah sebagai pelaku ekonomi dilapangan dan institusi perbankan sebagai pengelola dan penyalur modal. Semua komponen tersebut harus berkarya dan berbuat sesuai dengan kapasitasnya dalam suatu komunitas pemulihan ekonomi nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat dalam landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan idiil Pancasila.

Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk memulihkan ekonomi nasional. Jatuhnya ekonomi nasional yang begitu dalam dan cepat pulih disebabkan oleh sumbangan yang besar dari ekonomi rakyat. Namun Frans Seda, (2002) mengatakan bahwa pulihnya ekonomi dalam waktu singkat disebabkan oleh faktor kepercayaan pada program pemerintah dalam kerjasama dengan IMF dan hilangnya panik ekonomi yang turut berperan disamping peranan yang besar dari ekonomi rakyat.

Ekonomi rakyat masih perlu diberdayakan dan pemberdayaan itu dilakukan melalui "*link and match*" dengan sektor swasta. Melalui pemberdayaan sektor swasta maka diharapkan/dianggap ekonomi rakyat akan dapat diberdayakan pula. Dalam ruang Indonesia kata rakyat dalam kontek ilmu ekonomi selayaknya diterjemahkan sebagai satuan besar individu aktor ekonomi

jenis kegiatan usaha berskala kecil dalam permodalannya, sarana teknologi produksi yang sederhana, manajemen usaha yang belum bersistem, dan bentuk kepemilikan usaha secara pribadi. Kelompok usaha dengan karakteristik seperti inilah yang mendominasi struktur dunia usaha di Indonesia (Frederik Benu, 2002)

Menurut Frans Seda, (2002) kemampuan *resistensi* ekonomi rakyat adalah pada tingkat “*subsistence economy*”. Ekonomi rakyat juga merupakan ekonomi “*from hand to mouth*”. Apa yang dihasilkan, dihabiskan, tidak ada kelebihan untuk melanjutkan dan mendinamisasikan kegiatan. Jika hal ini dilakukan, maka dilaksanakan melalui utang. Itulah sebabnya peran “lintah darat” besar dalam ekonomi rakyat. Disamping itu juga dikatakan bahwa hal ini dikemukakan tidak dengan maksud untuk memojokan ekonomi rakyat, namun untuk mengungkapkan kenyataan yang dihadapi yang perlu diperbaiki agar tugas nasional yang diserahkan kepada ekonomi rakyat dapat terlaksana dengan baik dan penuh prospek dan perspektif. Tugas nasional tersebut adalah mengatasi pengangguran, kemiskinan, utang. Ketiga target ini memang mengena pada kepentingan ekonomi rakyat dan merupakan tantangan bagi ekonomi rakyat. Dengan demikian, dalam menghadapi tugas besar/tugas nasional ini para pelaku ekonomi rakyat perlu diberdayakan.

Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, Mubyarto (2003) menjelaskan bahwa para pemimpin ekonomi Indonesia, baik dari kalangan pemerintah, dunia bisnis, maupun kalangan pakar agar berpikir keras menyusun aturan main atau sistem ekonomi baru yang mengacu pada sistem sosial dan budaya Indonesia sendiri. Jika Pancasila kita terima sebagai ideologi bangsa, maka kita tidak perlu merasa ragu mengacu pada Pancasila lengkap dengan lima silanya dalam menyusun sistem ekonomi yang dimaksud. Sistem Ekonomi Pancasila mencakup kesepakatan “aturan main etik” sebagai berikut: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa: perilaku setiap warga

negara digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab: ada tekad seluruh bangsa untuk mewujudkan pemerataan nasional. 3) Persatuan Indonesia: nasionalisme ekonomi. 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: demokrasi ekonomi. 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: desentralisasi dan otonomi daerah.

Pemberdayaan ekonomi rakyat dewasa ini diperlukan untuk membina kader-kader pelaku ekonomi generasi baru menggantikan generasi pelaku ekonomi yang sudah tumbang yang awalnya juga berasal dari ekonomi rakyat, pedagang kecil dan menengah. Namun generasi pelaku ekonomi nasional yang bersih tidak dimanjakan dengan subsidi, proteksi dan fasilitas namun tetap profesional dalam berusaha (Frans Seda, 2002).

### **Ekonomi Rakyat Yang Berkeadilan**

Laporan Bank Dunia (2005) bertajuk *World Development Report* menyebutkan dalam pengantarnya bahwa keadilan (*equity*) adalah salah satu aspek fundamental dalam mencapai kemakmuran jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketimpangan dalam kesempatan dan akses ekonomi berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Pemerintah sering memberikan penekanan dan perhatian yang lebih memfokuskan keadilan ekonomi dan pemerataan pembangunan pada berbagai program kerjanya. Ini berarti pemikiran dan strategi pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak pernah luput dari perdebatan antara pengutamaan efisiensi dan pertumbuhan disatu pihak melawan pengutamaan efektivitas dalam pemerataan dan keadilan ekonomi dilain pihak.

Menurut Mardiasmo, (2004) efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan atau juga dikatakan bahwa efektivitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas sektor publik, sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif bilamana kegiatan dimaksud mempunyai pengaruh

yang besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik yang tidak lain merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jadi efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai suatu tujuan, sedangkan The Liang Gie dan Thoha (Syamsi Ibnu, 2004) mengatakan efisiensi adalah merupakan suatu usaha untuk mencapai prestasi yang sebesar-besarnya dengan menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia (material, mesin dan manusia) dalam tempo yang sependek-pendeknya didalam keadaan yang nyata (sepanjang keadaan itu bisa berubah) tanpa mengganggu keseimbangan antara faktor tujuan dan waktu. Efisiensi juga diartikan sebagai perbandingan terbaik antara suatu hasil dengan usahanya. Menurut Kertasapoetra (2007) efisiensi merupakan suatu penghematan baik dalam bidang pembiayaan atau pengeluaran untuk usaha.

Keadilan ekonomi muncul menjadi masalah masyarakat yang sangat mendasar dan penting karena sistem produksi dan sistem distribusi yang berdasar kekuatan-kekuatan pasar global mulai mempengaruhi kedalam sistem politik dimana pemerintah mau tidak mau atau suka tidak suka harus turut campur tangan, karena kekuatan pasar global mulai menunjukkan kekuasaan dan dominasi yang mengatur hubungan produksi dan distribusi diantara pelaku-pelaku ekonomi yang menjurus kearah ketidakadilan ekonomi.

Untuk itu campur tangan pemerintah sebagai lembaga politik yang strategis diharapkan mampu mengubah kecendrungan ketidakadilan ekonomi yang dikhawatirkan mengganggu kesejahteraan masyarakat. Meskipun berbagai pemikiran dan strategi tentang keadilan ekonomi belum mencapai sasarannya, namun haruslah diakui dan disadari bahwa dukungan terhadap pemikiran dan strategi tersebut semakin kuat. Dalam hal ini kekuatan tersebut bisa berbentuk: 1) pertumbuhan kekuatan serikat kerja (buruh), 2) kekuasaan pemilik modal yang kemudian mendominasi kekuatan pasar, 3) kekuatan pasar tidak lagi dianggap mampu

melaksanakan secara baik dan penuh fungsinya dalam alokasi sumber daya dan hasil-hasilnya.

Baik dunia bisnis sendiri maupun pemerintah mengalami hal ini sebagai permasalahan dalam keadilan ekonomi, maka dari itu alokasi sumber daya selanjutnya dilaksanakan melalui pasar dan tidak melalui pasar. Dalam kongres ekonomi umat (rakyat) telah mendeklarasikan arus baru ekonomi yang berkeadilan seperti: 1) menegaskan sistem perekonomian nasional yang adil dan merata dan mandiri dalam mengatasi kesenjangan ekonomi, 2) mempercepat redistribusi dan optimalisasi sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan, 3) memperkuat sumber daya manusia yang berkompeten dan berdaya saing tinggi berbasis keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi, investasi dan kewirausahaan, 4) menggerakkan koperasi dan usaha mikro kecil menengah menjadi pelaku usaha pertama perekonomian nasional, 5) mewujudkan mitra sejajar usaha besar dengan koperasi dan usaha mikro kecil menengah dalam sistem produksi dan pasar terintegrasi.

Deklarasi arus baru ekonomi yang berkeadilan ternyata memiliki karakteristik ekonomi yang sama dengan ekonomi koperasi, artinya pemikiran terhadap arus baru ekonomi yang berkeadilan lebih berorientasi "kepentingan". Pemikiran tentang keadilan ekonomi yang telah dicoba dikorelasikan kedalam potensi kekuatan-kekuatan tersebut, dalam hal ini kita sebagai anak bangsa mencoba mendudukan dalam konteks perkembangan pemikiran teoritis tentang pasang surut konsep keadilan ekonomi. Sejak Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dilaksanakan secara murni dan konsekuen oleh pemerintah dan pelaku-pelaku ekonomi, maka akan dapat dirasakan pertumbuhan kekuasaan pemerintah secara nyata, tetapi pada saat yang sama masyarakat juga mengamati pertumbuhan kekuatan-kekuatan dunia bisnis swasta yang pesat melalui akumulasi modalnya yang diakui atau sudah menjurus kearah kekuatan-kekuatan

monopoli dan oligopoli. Bahkan saat ini kondisi ekonomi kita masih mengalami tantangan dan ketidak pastian ekonomi global.

De Soto (2000) dengan meyakinkan menunjuk pada “berlian” dinegara-negara berkembang yang tak pernah dikenali, baik oleh pemerintah maupun oleh perencana pembangunan. Berlian dimaksud adalah potensi domestik yaitu kekuatan-kekuatan “ekonomi rakyat” yang telah terbukti tahan banting dalam situasi krismon dan telah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran total. Ekonomi rakyat menjadi pendukung utama perekonomian nasional meskipun hampir tidak pernah dipihaki kebijakan-kebijakan pemerintah. Pemulihan ekonomi nasional dari krisis yang berkepanjangan justru terletak pada ekonomi rakyat (Mubyarto, 2003). Walaupun kondisi ekonomi kita masih mempunyai harapan yang cukup menggembirakan kedepan, namun kondisi keadilan ekonomi di negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya ini masih sangat sulit dan sangat mahal harganya untuk mewujudkannya.

Pemerintah sebagai lembaga politik harus berani menggariskan bahwa kedepan sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi koperasi (sistem ekonomi rakyat) karena sistem ekonomi inilah yang dianggap paling relevan akan menjamin “pemerataan dan keadilan di Indonesia”. Tidak dapat dimungkiri, koperasi merupakan manifestasi dari visi para pendiri negeri di dalam dimensi cita-cita pembangunan perekonomian nasional. Bahkan oleh sang Bapak Koperasi Nasional, Bung Hatta, koperasi disebut sebagai perwujudan dari Demokrasi Ekonomi Rakyat Indonesia.

Selain secara praktis dapat dilihat sebagai bagian dari usaha perekonomian, secara ideologis koperasi merupakan perwujudan dari semangat dan nilai-nilai luhur bangsa, khususnya perihal asas-asas ekonomi kerakyatan atau ekonomi kekeluargaan. Sebagaimana yang telah dikonsepsikan sebagai wujud dari Demokrasi

Ekonomi Indonesia, koperasi merupakan *soko guru* ekonomi kerakyatan yang berarti, koperasi ialah suatu usaha yang berasaskan, “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, dimana pemberdayaan, keadilan dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan utamanya.

Dengan kata lain bukanlah jenis (badan) usaha yang hanya bermaksud untuk menyejahterakan elit atau segelintir orang (yang bermodal) saja. Sebaliknya dengan semangat kekeluargaan, koperasi mengajak setiap anggotanya untuk sejahtera bersama-sama dengan modal dan usaha bersama. Dalam konteks ini kekeluargaan diartikan sebagai wujud kegotongroyongan (kebersamaan) layaknya keluarga yang mempunyai ikatan kuat mau saling berbagi dan saling membantu.

Apabila ekonomi rakyat menerima kedudukan dan peran sebagai keadilan ekonomi maka sudah selayaknya pemerintah dan para *stakeholder* untuk secara bersama-sama memberikan perhatian dan pemberdayaan yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya agar ekonomi rakyat mampu mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi sesuai karakteristiknya yaitu:

- 1) Ekonomi rakyat lahir sebagai hasil tuntutan akan adanya nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi dalam kehidupan perekonomian, seperti kemanusiaan, pemerataan, keadilan, persamaan, kejujuran dan sebagainya dalam sistem ekonomi yang berlaku,
- 2) Ekonomi rakyat sesuai dengan konsepnya adalah ekonomi yang digerakkan oleh koperasi dan usaha mikro kecil, menengah karena sesuai falsafah ideologinya, sehingga ekonomi rakyat menjunjung tinggi kebersamaan hakekat dan martabat manusia dan keadilan ekonomi. Sumbangan PDB koperasi terhadap PDB nasional telah mengalami peningkatan yakni mencapai 3,9 persen meningkat hingga duakali lipat dari tahun 2013 dibandingkan dengan dua setengah tahun lalu yang

semula sebesar 1,71 persen. Demikian juga rasio kewirausahaan Indonesia pada tahun 2013 yang semula sebesar 1,55 persen, saat ini telah mengalami peningkatan menjadi 3,01 persen, atau diatas syarat minimal 2 persen standar internasional.

Koperasi yang berkualitas berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan. Namun peningkatan itu masih lebih rendah dibandingkan negara lain. Prancis misalnya kontribusi koperasi terhadap perekonomian negaranya sebanyak 18 persen, Belanda mencapai 18 persen Selandia Baru 20 persen. Ini pekerjaan besar kita, agar kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional meningkat.

Oleh karena itu ekonomi rakyat yang berperan sebagai pelaku ekonomi koperasi sangat ditentukan oleh kualitas anggotanya, karena anggota koperasi dapat berperan sebagai pemilik, sebagai pelanggan (pengguna) dan sebagai pengelola. Maka dari itu anggota koperasi harus profesional dalam mengelola dan memanfaatkan koperasi,

- 3) Sistem ekonomi rakyat bekerja atas landasan mental, setia kawan dan kesadaran berpribadi yang berarti kebersamaan yang dinamis dan berkeadilan yang dinamis untuk mengembangkan kepentingan bersama guna mencapai tujuan bersama,
- 4) Gotong royong yang diterapkan oleh ekonomi rakyat memberikan watak khas sesuai budaya bangsa Indonesia sebagai lembaga yang demokratis, karena mengemban amanat dan cita-cita Pancasila dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ini berarti cermin dari keadilan ekonomi,
- 5) Asas dan sendi-sendi dasar ekonomi rakyat yang bersumber pada falsafah dan ideologi yang dianutnya yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan pada tempat utama (terhormat) karena

ekonomi rakyat selalu berusaha untuk berpegang teguh pada keadilan ekonomi pada khususnya dan keadilan sosial pada umumnya.

## SIMPULAN

Dengan memperhatikan strategi dan kajian tersebut, maka ekonomi rakyat yang berkeadilan memiliki karakteristik dan ideologi kekeluargaan dan gotong royong yang sangat relevan akan menjamin keadilan ekonomi karena ekonomi rakyat merupakan bangun perusahaan yg sesuai dengan amanat dan cita-cita konstitusi. Ini berarti arah dari pada sistem perekonomian Indonesia sudah terlihat jelas dan sesuai dengan sistem ekonomi rakyat yang berkeadilan. Arus baru ekonomi yang berkeadilan bukannya produk ekonomi baru melainkan bagian dari ekonomi rakyat yang sudah ada yaitu koperasi.

Koperasi perlu meneguhkan kembali semangat gerakan koperasi agar dalam perubahan global yang sangat cepat koperasi bisa mengikuti dan berkompetisi dengan perusahaan swasta dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kita ingin koperasi jadi institusi yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena itu koperasi harus diperkuat dan diberdayakan. Untuk itu pemerintah menempatkan koperasi sebagai intitusi utama dalam kebijakan pemerataan ekonomi. Faktanya koperasi masih belum menjadi sokoguru perekonomian negara. Setidaknya sampai sejauh ini masih belum mengarah kesana. Banyak penyebabnya, salah satunya kapitalisme dengan kehadiran *minimarket* yang telah merambah ke desa-desa. Iklim yang dikembangkan membuat koperasi tidak bisa bertahan atas gempuran lembaga ekonomi yang lain.

Koperasi sebagai lembaga penggerak ekonomi rakyat dan memacu terwujudnya demokrasi ekonomi yang memiliki unsur pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ketika koperasi tersebar luas dan kuat secara ekonomi, tentunya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian gerakan revitalisasi

koperasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semangat demokrasi ekonomi. Jika saja anggota koperasi lebih dominan diisi para pelaku sektor informal yang sudah terkenal sangat tangguh dan ulet, maka gerakan koperasi itu akan cepat berkembang. Dengan cara ini sektor informal akan berkembang, sehingga tujuan dan cita-cita mulia koperasi untuk menyejahterakan anggotanya, masyarakat dan bangsa Indonesia akan segera tercapai.

Apabila ekonomi rakyat menerima kedudukan dan peran sebagai keadilan ekonomi maka sudah selayaknya pemerintah dan para *stakeholder* untuk secara bersama-sama memberikan perhatian dan pemberdayaan yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya agar ekonomi rakyat mampu mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi sesuai karakteristiknya, yaitu: Ekonomi rakyat lahir sebagai hasil tuntutan akan adanya nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi dalam kehidupan perekonomian, seperti kemanusiaan, pemerataan, keadilan, persamaan, kejujuran dalam sistem ekonomi yang berlaku. Ekonomi rakyat sesuai dengan konsepnya adalah ekonomi yang digerakkan oleh koperasi dan usaha mikro kecil, menengah karena sesuai falsafah ideologinya, sehingga ekonomi rakyat menjunjung tinggi kebersamaan hakekat dan martabat manusia dan keadilan ekonomi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP), AMP. YKPN. Yogyakarta.
- Bayu Krisnamurthi. 2002. Krisis Moneter dan Ekonomi Rakyat. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Th. I .(3)
- De Soto, Hernando. 2000. *"The Mystery of Capital"*. Black Swam. London.
- Frans Seda. 2002. Krisis Moneter Indonesia. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Th I (3).
- Fredrik Benu. 2002. Ekonomi Rakyat dan Pemberdayaan: Suatu Kajian Konseptual. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Th I (10).

- Kartasapoetra, G. 2007. *Koperasi Indonesia*. Rineka. Jakarta.
- Mubyarto. 2002. *Ekonomi Rakyat Pasca Krismon. Ekonomi Rakyat, Perbankan, Etik, dan Krisis Moneter 1997/1998. Jurnal Ekonomi Rakyat*. Th. I (1).
- Mubyarto. 2003. *Mengembangkan Ekonomi Rakyat Sebagai Landasan Ekonomi Rakyat. Jurnal Ekonomi Rakyat*. Th II (8).
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Mayasari. Yogyakarta.
- Syamsi Ibnu. 2004. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Renika Cipta. Jakarta.
- Tambunan, Tulus. 2002. *Perekonomian Indonesia*. Ghalia Indonesia.